

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun Indonesia mengalami kenaikan pada tingkat kemiskinan, karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjadi sebuah permasalahan. Permasalahan kemiskinan ini masih dihadapi di beberapa negara, khususnya wilayah Jakarta. Kemiskinan ialah suatu kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan finansial fisik maupun non fisik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 angka kemiskinan di Jakarta Pusat mencapai 4,90 persen.¹

Kemiskinan sebagai suatu gejala sosial yang berbeda dengan kemiskinan sebagai gejala ekonomi. Kemiskinan sosial (*cultural*) lebih banyak berkaitan dengan sikap hidup penduduk miskin yang tidak mempunyai keinginan untuk maju dan berusaha memperbaiki taraf kehidupan. Sedang kemiskinan ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi disekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah pendapatan.² Kemiskinan berkaitan dengan tingkat kebutuhan serta pendapatan. Kebutuhan hanya dibatasi dengan kebutuhan pokok sebagai kebutuhan dasar minimum seseorang agar dapat hidup layak. Dilihat dari tingkat pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut masuk dalam kategori miskin. Oleh sebab itu, kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Tingkat

¹Sensus data, “Badan Pusat Statistik kemiskinan Jakarta Pusat” 2022
<<https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>>.

²Darma Rika, ”Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta”, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB) Vol.2 No.2 Oktober 2014,65.h.60.

pendapatan minimum merupakan batas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut dengan garis kemiskinan (*absolut*).³

Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari suatu masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan. Untuk menentukan kemiskinan absolut bukan hanya dilihat dari kebutuhan biologis tapi dari dalam ruang lingkup sosial.⁴

Melihat tingkat kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan antar sesama manusia yang menjadikan kemiskinan sebagai salah satu fenomena sosial yang terdapat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini menjadi permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional berwajah banyak dan akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.⁵

Kemiskinan merupakan permasalahan yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia.⁶ Bahwa faktor utama penyebab kemiskinan terutama karena faktor alamiah. Seseorang menjadi miskin karena mereka dilahirkan dari keluarga miskin. Kemiskinan menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi

³Rizy Fathiyah, "Analisis pengaruh sosial ekonomi terhadap pengeluaran konsumsi keluarga miskin", *Jurnal Ilmiah*. 21 Desember 2015.h. 72.

⁴Darma Rika, "Analisis Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta," *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, Vol.2 No.2, h. 66.

⁵Rudy Susanto dan Indah Pangesti, "Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5.4 (2019), 340. h. 70

⁶V.A.R.Barao et al., analisis dampak pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta, *Braz Dent J.*, 2022, xxxiii.h.99.

kebutuhan dasar tetapi juga tidak mampu mengembangkan status sosialnya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan mata rantai yang bila tidak diputus akan menyebabkan kemiskinan tersebut selalu ada.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS tahun 2020 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 480,86 juta atau 4,53% dari total penduduk Indonesia yang berada di DKI Jakarta. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 4,69 juta orang atau kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2022. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di kota Jakarta Pusat pada tahun 2020-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Persentase Penduduk Miskin Di Kota Jakarta Pusat Tahun 2020-2022

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan		
	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	41,92	45,1	44,72
Persentase Penduduk Miskin (%)	4,51	4,94	4,90
Garis Kemiskinan (Rupiah)	672 328	689 379	733 176

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2020)

Pada data di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Angka kemiskinan yang dihasilkan dalam data BPS tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 41,92 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 45,1 jiwa. Namun pada tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan 0,4 persen dengan jumlah 44,72 penduduk miskin yang tercatat di wilayah Jakarta Pusat.

Salah satu cara untuk menangani kemiskinan yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perekonomian di

suatu negara yang mengalami peningkatan bernilai positif atau menuju ke keadaan yang lebih baik dalam sebuah negara. Untuk memperbaiki perekonomian di suatu negara maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan sumber daya alam yang tersedia untuk dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, Jika kompetensi sumber daya manusianya baik, maka proses pembangunan akan semakin cepat terlaksana. Dengan begitu pembangunan ekonomi akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah.⁷

Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah membuat kebijakan berupa program-program yang mensejahterakan masyarakat tergolong miskin. Terdapat dua strategi untuk pengentasan kemiskinan diantaranya. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar memiliki kemampuan berupa kreativitas dalam membuat suatu usaha yang meningkatkan pendapatan.⁸

Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan kebijakan suatu program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian banyaknya program yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya ialah Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa disingkat menjadi BPNT. BPNT sebagai pemberian sejumlah kebutuhan pokok pangan kepada masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat hal ini disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi sesuatu agar merealisasikan tujuan dan sasaran. Maka kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi

⁷Kurniawati Nastiti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di DKI Jakarta," (UII, 2017).h.18.

⁸Kominfo, "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II," *Kemkominfo*, 2011.h.18.

kemiskinan ialah dengan mengeluarkan berbagai program yang diberikan kepada masyarakat miskin.⁹

Sesuai hasil rapat terbatas tertanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, disepakati bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat RASTRA yang gantikan menjadi bantuan pangan non hal ini dilakukan melalui mekanisme non tunai yang menggunakan teknologi *e-voucher* sehingga dapat tepat sasaran dan mudah terjangkau oleh masyarakat. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai pilot project dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional.¹⁰

BPNT disalurkan setiap bulan sebesar 110.000/KPM dan dilaksanakan dengan sistem e-voucher melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching.¹¹ Masyarakat yang mendapatkan e-voucher dapat membeli beras dan bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan. evoucher (yang dikenal dengan nama Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) ini, telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2017. Bantuan Pangan Non-Tunai yang dimaksud dalam kajian ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah yang

⁹Handoyo Eko, *Kebijakan Publik* (Makasar: Widya Karya, 2012).h.1.

¹⁰Wahyudi, “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, Analisis Kebijakan Pertanian, Analisis Kebijakan Pertanian,” *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol. 16 No (2018).h. 2.

¹¹Kemenkeu.go.id, “indeks manfaat program BPNT,” diakses pada 07 Juli 2024. <<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/data-publikasi/pub/pengumuman/2916-indeks-manfaat-program-sembako.html>>.

diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Dalam program Rastra adalah beras dan bahan pangan dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai ini adalah beras, gula, telur dan lain-lain.¹²

Kebijakan pemerintah mengeluarkan program BPNT ialah untuk meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin di Indonesia, salah satunya wilayah Jakarta Pusat. Penerima manfaat yang telah terdata dan mendapatkan kartu elektronik berupa ATM atau akun elektronik yang digunakan hanya untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang telah disalurkan oleh pemerintah. Program BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulanya. Mekanisme pengambilan BPNT yaitu melalui akun elektronik berupa kartu ATM yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negara (Himbara).¹³

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui

¹²Benny Rachman, Adang Agustian, dan NFN Wahyudi, “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT),” *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16.1 (2018), 1. h. 35.

¹³Agustina Dita, “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penangan Kemiskinan di Kabupaten Gulangan Mojokerto,” Vol 10 Nomor 1 Tahun 2022. h. 182.

memenuhi sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁴

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 “Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”¹⁵

Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan dalam mengambil kebijakan sebagai penanganan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat dibuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.¹⁶ Dari data Kelurahan Petamburan yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinyatakan oleh Ibu Eva selaku sekretaris Kelurahan:

“Penerima manfaat BPNT sebanyak 1.577 keluarga dari Kementerian Sosial RI. Terdiri dari penerima bantuan sosial lainnya seperti, KPDJ sebanyak 440 orang, Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebanyak 5578 orang, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 35 orang, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 9948 orang. Serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bantuan

¹⁴Siti Mastufah, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek,” *Jurnal Unigal*.h. 4907.

¹⁵Basriati, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa” (Makassar: UMM, 2021).hal.5

¹⁶Debrina Vita Ferezagia, “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1.1 (2018), 1–6.

*pangan berupa non tunai ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran yang sebelumnya merupakan program beras sejahtera (rastra) berupa beras yang dikirimkan dari bulog. BPNT ini diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp.110.000 setiap bulannya. Nominal tersebut tidak bisa diuangkan melainkan ditukar dengan beras atau telur melalui e-warong”.*¹⁷

Terdapat dalam pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tidak tepatnya penyaluran bansos termasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur, yakni penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur atau prosedur layanan. Selain itu, terdapat juga potensi permasalahan administrasi lainnya yaitu terlambatnya masyarakat mendapatkan bantuan sosial serta dana yang diterima tidak utuh. Oleh karena itu, hal tersebut juga masuk ke dalam kategori penundaan berlarut-larut yang merupakan perbuatan mengulur waktu dalam penyelesaian layanan atau memberikan layanan kepada masyarakat.¹⁸

Namun kehadiran program tersebut terdapat banyaknya problematika seperti, tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, pemangkasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara sepihak, menciptakan peluang korupsi, dan menimbulkan konflik sosial serta penyaluran bahan pokok pangan yang tidak lengkap. Fenomena yang terjadi, dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dalam penetapan penerima manfaat, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut tetap hidup dalam kondisi kekurangan. Perilaku yang tidak adil dalam pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemimpinnya.¹⁹

Pada kenyataannya program BPNT merupakan pembaruan dari raskin dan program rastra yang mana program ini sudah cukup lama sejak tahun 2016 dan sudah

¹⁷Eva, Kasi Kelurahan Petamburan, wawancara di Kelurahan Petamburan, 13 November 2023.

¹⁸Ombudsmen RI, “Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi,” diakses pada 16 Juni, 2022 <<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>>.

¹⁹TNP2K, “Program Bantuan Pemerintah Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi,” diakses pada 28 Juni 2024, <[website TNP2K \(www.tnp2k.go.id\)](http://www.tnp2k.go.id)>.

tiga kali diperbarui dan yang terakhir ini bernama BPNT. Pada saat prasurvey peneliti menemukan beberapa masalah, diantaranya masih banyak ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang tepat karena masih ditemukan masyarakat yang komplek dan tidak tepatnya penyaluran tersebut yang seharusnya satu bulan sekali ini bisa sampai tiga atau dua bulan sekali, padahal bantuan ini semestinya setiap sebulan sekali, dan terdapat data penerima tidak tepat sasaran dengan dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi dinyatakan mampu justru menerima bantuan sedangkan data penerima yang berhak menerima bantuan atau tidak mampu justru tidak menerima bantuan. Tujuan pemerintah adanya program BPNT salah satunya dapat memenuhi kebutuhan pangan KPM selama satu bulan namun pada kenyataannya bantuan tersebut hanya cukup sampai satu atau dua minggu saja.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Dampak Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Ketahanan Pangan Keluarga Di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat dapat terlaksana dengan baik?
2. Bagaimana dampak penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan keluarga di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti lakukan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat

2. Untuk menjelaskan dampak penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan keluarga di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kota Jakarta Pusat

D. Manfaat Penelitian

Adapun dua manfaat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak dan sebagai kajian pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat Kota DKI Jakarta salah satunya di Jakarta Pusat Kelurahan Petamburan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pegawai yang menangani pendataan masyarakat dalam penyaluran agar tepat sasaran dan memberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan informasi serta bahan masukan yang dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa agar lebih mengetahui salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan bersubsidi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hasil penelitian, peneliti akan mencegah kesamaan dan lain-lain dari hasil temuan penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang sama, serta sebagai referensi penelitian yang berhubungan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh karena itu, salah satu kewajiban bagi peneliti untuk melakukan tahap penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan pada hasil orisinalitas penelitian dan plagiarisme. Maka peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan tema program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam skripsi ini, sebagai berikut:

Pertama, skripsi Nur Wulandari, berjudul “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di kecamatan Panakkukang Kota Makassar”, di *fakultas ilmu sosial Universitas Hasanudin Makasar*, 2021 penelitian ini berlokasi di panakkukang kota makassar. Hasil penelitian skripsi ini berfokus tentang program keluarga harapan (PKH) diantaranya: Konsep program keluarga harapan (PKH) dengan mendeskripsikan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat(KPM), 2) Kriteria penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), 3) kebijakan publik dalam konsep Evaluasi program, 4) Hak dan kewajiban serta proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).²⁰

Perbedaan dalam penelitian di atas pada penelitian yang saya lakukan ialah pada kebijakan publik dalam evaluasi program. Namun terdapat perbedaan pada variabel evaluasi program yang peneliti lakukan. Pada skripsi yang saya lakukan ialah menganalisis penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat miskin pada kebutuhan dasar pangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini tidak dapat diuangkan melainkan menerima bahan baku berupa beras atau telur. Evaluasi dalam menganalisis sebuah program yang masih dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan model sumatif.

Kedua, skripsi Firdah Ardiyano Bahari, yang berjudul "Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep Al-falah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", di *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 6T yang telah tercapai meskipun belum maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, penelitian ini berbasis dalam konsep Al-

²⁰Nur Wulandari, “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di kecamatan Panakkukang Kota Makassar” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

Falah yang hanya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat duniawi meskipun belum sejalan dengan konsep kesejahteraan akhirat.²¹

Kesamaan dalam penelitian di atas pada penelitian yang saya lakukan ialah pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun terdapat perbedaan pada variabel cara upaya kesejahteraan dalam konsep Al-falah. Penelitian dalam skripsi yang saya lakukan ialah, menganalisis pemerataan dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai yang tetap sasaran, selain itu pemahaman masyarakat terkait bantuan ini dapat difungsikan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh kebijakan publik. Kemudian dari hasil evaluasi yang menganalisis program tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan yang mengurangi biaya pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Mayang Shahira Junaidi, Bambang Mulyatno dan Wahyu Dyah Prastiwi yang berjudul “The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta” di *Fakultas Agribisnis Universitas Diponegoro*, 2017. Penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi RASTRA kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan setiap bulan kepada pihak penerima namun dengan kualitas beras yang cukup buruk serta tidak utuh karena beras tersebut dibagi kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki beberapa golongan kepada pihak penerima manfaat, golongan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yang membedakan banyaknya barang yang diterima oleh masing-masing penerima.

²¹Firdah Ardiyani, “Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep Al-falah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Universitas Alauddin Makassar, 2021).

Sehingga penelitian ini meneliti nilai kepuasan penerima bantuan RASTRA dan BPNT.²²

Kesamaan dalam penelitian di atas pada penelitian yang saya lakukan ialah pada pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Namun terdapat perbedaan pada variabel cara upaya penilaian kepuasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada program Bantuan Pangan Non Tunai. Pada penelitian yang saya lakukan ialah dampak terhadap ketahanan pangan masyarakat miskin yang menerima bantuan pangan non tunai, sehingga meringankan beban pengeluaran dan mendapatkan gizi yang seimbang untuk mereka.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Menurut Mardiasmo 2017 bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, ia beroperasi secara efektif. Indikator efektivitas menunjukkan efektivitas dan sejauh mana hasil (results) program dalam mencapai tujuan program. Semakin tinggi kontribusi output dari hasil untuk mencapai tujuan atau maksud yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. Menurut Mahmudi 2010 bahwa efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun proses tindakan dikatakan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan dan tujuan akhir.²³

Dari pendapat di atas jelas bahwa efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena dapat menguraikan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Atau, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dibandingkan dengan

²²Mayang Saharia Junaidi, "The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta", *Jurnal Ilmiah Econosains-ISSN*, vol.15 (2017).

²³Krisdayanti, "Efektivitas Krisdayanti 2022," *Efektivitas Pembelajaran*, Krisdayanti, 2022,h.25.

aktivasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menjadi teori dasar yang digunakan untuk menentukan alur berpikir.

Dengan menggunakan teori tersebut menjadi landasan peneliti dengan dasar-dasar pemikiran yang berada dalam latar belakang dari hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, harus memiliki landasan teori yang mendasari penelitian agar lebih terarah. Maka kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan konteks penelitian lebih lanjut yang menjelaskan penelitian, metodologi, serta penggunaan teori pada penelitian ini. Kerangka pemikiran pada suatu penelitian merupakan model konseptual mengenai teoritis antara variabel yang akan diteliti.

Maka teori efektivitas membentuk kerangka pemikiran sebagai konseptual yang mengenai teoritis dalam penelitian yang dapat diterima oleh akal. Oleh karena itu penelitian ini menentukan kriteria-kriteria yang melibatkan beberapa subjek terkait program BPNT menjadi pedoman pelaksanaan program dengan indikator implementasi kebijakan, indikator evaluasi program serta teori faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini. Dari teori serta hasil observasi langsung ke subjek terkait maka peneliti akan melakukan analisis untuk mengetahui serta mampu menjelaskan terkait evaluasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Petamburan. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang disalurkan kepada masyarakat miskin dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Berikut penjelasan dalam penelitian ini:

a. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kebutuhan pangan yang terpenuhi setiap individu maupun negara seperti makanan bergizi, aman, bermutu dan terjangkau. Ketahanan pangan adalah hal yang penting untuk keberlangsungan hidup karena berdasarkan beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Setiap negara membutuhkan pangan untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup, dalam memenuhi kebutuhannya. Ketahanan pangan menurut

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.²⁴ Karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Karena harus ada lembaga yang mengatur ketersediaan, stabilitas dan pola konsumsinya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat miskin agar mendapatkan gizi yang cukup serta kesejahteraan.

b. Kesejahteraan

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Speaker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial.²⁵

Di Indonesia, kesejahteraan dapat dilihat dari lingkungan sosial ialah kondisi kehidupan masyarakat antara lain dapat dilihat dari pengertian kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok sosial, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan kesejahteraan sosial ialah kondisi

²⁴Nurani STP Wityasari, "Pengertian Ketahanan Pangan Aspek, Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi," *Staf Dinas Ketahanan Pangan Kab Probolinggo*, 1997, 2021.

²⁵Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6.2 (2018).h. 99.

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.²⁶

Upaya untuk terciptanya perbaikan kesejahteraan bagi setiap individu maupun masyarakat luas ialah upaya pembangunan. Istilah pembangunan merupakan suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan.

Kesejahteraan bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan permukiman atau perumahan. Melainkan tercapainya kemampuan masyarakat untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung oleh pihak lain untuk sebuah kepentingan. Adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi masyarakat tanoa adanya rasa takut.²⁷

Maka kata sejahtera diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin). Dalam hal ini, kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, keterlantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila, dan kenakalan remaja. Sebagai konsekuensinya, pengertian kebijakan kesejahteraan rakyat seringkali diartikan sebagai kegiatan amal atau bantuan publik yang dilakukan pemerintah bagi keluarga miskin dan anak-anak mereka; yang oleh para pakar ilmu sosial dihubungkan dengan kondisi, yaitu: tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat yang

²⁶Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan* (Depok: Rajawali Pers, 2018).h.5.

²⁷Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013).h.3-4.

dilihat dari tiga indikator utama: tingkat harapan hidup (expectation of life), tingkat pendidikan (literacy, education), dan tingkat pendapatan (income).²⁸

c. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sejak tahun 2017 pemerintah bertahap mens transportasi penyaluran dari RASTRA menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).²⁹ Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran serta mendorong pemenuhan kepada masyarakat khususnya kelas menengah kebawah. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dari pemerintah berupa non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di *e-warong* yang bekerjasama dengan bank HIMBARA. Program BPNT melalui keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bantuan sosial non tunai diberikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program ini disalurkan ke beberapa wilayah kabupaten atau kota yang terpilih dan memiliki kesiapan dari segi akses maupun fasilitas yang mendukung agar program BPNT dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diharapkan agar mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan pemerintah yang menerima bantuan ini, sehingga penyaluran BPNT agar tepat sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat agar lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Pada kartu elektronik yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga masyarakat juga memperoleh nutrisi yang seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. sebelum

²⁸W.J.S. Poewardawimta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia* (Bandung,1990).

²⁹Ishak Fadlurrohimi, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Sri Sulastri, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)," *Share : Social Work Journal*, 9.2 (2020), 122.h.123.

menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, masyarakat harus mendaftar sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).³⁰

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018, program BPNT adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra (Beras Sejahtera) yang disalurkan secara non tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang hanya digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. *Kedua*, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. *Ketiga*, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. *Keempat*, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dalam memenuhi kebutuhan pangan.³¹

Mekanisme penyaluran program BPNT ialah melalui tahapan:

- a) Registrasi dan/atau pembukaan rekening
- b) Edukasi dan sosialisasi
- c) Penyaluran
- d) Pembelian barang

Bantuan pangan non tunai bertujuan untuk:

³⁰Zulbaidah, "Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)", *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pertanian* (2020).h.79.

³¹Ana Rosaliana dan Susi Hardjati, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya," *Public Administration Journal of Research*, 1.2 (2019).h.101.

- a) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b) Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
- c) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi
- d) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat BPNT yaitu untuk meningkatkan: ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, efisiensi penyaluran Bantuan Sosial, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, transaksi nontunai dan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.³²

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Petamburan Kota Jakarta Pusat RW 003 dijadikan lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan mencapai 4,90 persen menurut BPS. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin pada tahun 2022. KPM yang terdaftar sejak tahun 2017-2022 di RW 003 sebanyak 329 Kepala Keluarga penerima manfaat BPNT.

Pada hasil penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyusun kegiatan penelitian serta diharapkan untuk memperoleh keputusan atau kesimpulan dari hasil penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan metode kualitatif dengan data yang dihasilkan dari hasil observasi dan dipaparkan secara deskriptif. Dalam

³²Andreas Reichenbach et al., "Permensos no 20 tahun 2017," *Progress in Retinal and Eye Research*, 561.3 (2019), S2–3.h.166.

penelitian bertujuan untuk mengetahui kejadian sosial terhap ketahanan pangan dari penyaluran BPNT kepada penerima manfaat di Kelurahan Petamburan RW 003.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan November sampai bulan Desember. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di RW 003 Petamburan. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena, di wilayah petamburan yang menerima BPNT sebanyak 329 kepala keluarga dari Kementerian Sosial RI di RW 003. Adapun data penerima bantuan sosial lainnya seperti, KPDJ sebanyak 440 orang, Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebanyak 5.578 orang, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 35 orang, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 9.948 orang di Kelurahan Petamburan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dihasilkan dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data. Maka proses pengumpulan data peneliti menggunakan tiga teknik, diantaranya:³³

a) Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai hasil dari dampak kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan hidup layak kepada penerima manfaat BPNT di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Metode observasi ini dilakukan untuk menjabarkan pengamatan penelitian agar memperoleh informasi yang akurat dan spesifik terkait penyaluran BPNT di RW 003 Kelurahan Petamburan.

b) Wawancara

Dalam mengumpulkan data pada saat penelitian teknik wawancara dilakukan agar memperoleh sumber informasi melalui interaksi secara langsung kepada informan dengan wawancara mendalam.³⁴ Wawancara dilakukan dengan beberapa informen

³³Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, 02.1 (2003).h.59.

³⁴ Puput, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9,(2018), h. 1-8.

untuk menghasilkan data-data objektif yang nantinya dapat ditarik kesimpulan melalui tahap analisis. Hasil wawancara diperoleh dari Bapak Arip selaku Koordinator Kecamatan Tanah Abang, Bapak Fahri selaku Lurah Petamburan, Ibu Eva Selaku Kasi Kelurahan Petamburan, Ibu Ita Selaku Petugas TKSK, Bapak Reza selaku Ketua RW 003 Petamburan, Bapak Didit selaku Ketua RT 014 Petamburan Ibu Rita warga RT 014, Bapak Edi warga RT 013, Ibu Handini Warga RT 013, Ibu Dina warga RT 014, Ibu Sulastri warga RT 014 dan Ibu Yuli Selaku Ketua RT 013.

Metode wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, maka pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dengan demikian peneliti akan memberikan pertanyaan, mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan dari informan. Berikut informan dalam penelitian ini adalah staf kelurahan, penerima manfaat bantuan, pengurus pengelolaan BPNT, serta masyarakat sekitar.³⁵

c) Dokumentasi

Teknik ini ialah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data seperti dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini baik foto yang berhubungan dengan proses penyaluran BPNT, serta dokumen-dokumen kelurahan yang berhubungan program BPNT dan keluarga penerima manfaat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam data primer ialah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

- a) Sumber data primer, ialah data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berpotensi dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian dengan subjek penelitian baik secara

³⁵ Antonius Alijoyo, *Wawancara Terstruktur atau Semi-terstruktur*, CRMS (Jakarta, 2022), h. 25.

observasi ataupun pengamatan langsung di Rw 003 Kelurahan Petamburan serta wawancara dengan 4 informan yaitu Bapak Fahri sebagai Lurah Petamburan, Ibu Eva sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat, Ibu Ita sebagai Petugas TKSK, Bapak Arip sebagai Koordinator Kecamatan Tanah Abang, Bapak Reza sebagai Ketua RW, Bapak Didit sebagai Ketua RT 14. Wawancara dengan Penerima dan bukan penerima BPNT terdapat 6 informan yaitu Ibu Rita Rosita sebagai bukan penerima bantuan, Ibu Dina sebagai bukan penerima bantuan, Ibu Yuli sebagai RT 13 dan bukan penerima bantuan, Ibu Sulastri sebagai penerima bantuan, Bapak Edi sebagai penerima bantuan, Ibu Handini sebagai penerima bantuan,

- b) Sumber data sekunder, ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang berupa dokumen atau arsip, buku, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan program BPNT terhadap ketahanan pangan. Dalam pengumpulan data sekunder peneliti menunjang langsung kepada staf Kelurahan diantaranya Bapak Fahri Sebagai Pengurus Barang Pembantu dan Bapak Haidir sebagai KA. Satuan Pelayanan Dukcapil serta dari staf Kecamatan yaitu Ibu Rani sebagai Staff Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan analisis yang dilakukan untuk menarik kesimpulan. Model interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:

- a) Reduksi Data

Reduksi data memiliki kesamaan merangkum, teknik pengumpulan data ini memilih bagian pokok yang memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Oleh karena itu reduksi data dilakukan untuk memiliki bagian-bagian yang penting saja dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

- b) Penyajian Data

Pada proses penyajian data dari data yang telah direduksi maka perlu men *display* data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun data yang berbentuk uraian, grafik dan sebagainya.

c) Kesimpulan

Langkah terakhir pada proses analisis data adalah kesimpulan. Setelah menelaah seluruh data serta menafsirkan dengan analisis sesuai kemampuan nalar peneliti dalam membuat kesimpulan penelitian tentang Pemerataan penyaluran BPNT pada ketahanan pangan penerima manfaat di RW 003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka diperlukan susunan sistematika pada penulisan. Berikut uraian sistematika penulisan skripsi diantaranya:

BAB I pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum Kelurahan Petamburan meliputi jumlah penduduk, mata pencaharian, masyarakat yang berhak menerima bantuan. Selain itu juga dijelaskan tentang kondisi umum masyarakat RW 003 yang akan dianalisis dan diuraikan dari hasil penelitian.

BAB III berisi hasil dari penelitian lapangan berupa penjelasan mengenai struktur pelaksanaan program, sarana dan prasarana Kelurahan Petamburan dalam pelaksanaan program BPNT serta proses penyaluran BPNT di RW 003 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang.

BAB IV berisi tentang penjelasan dampak dari bantuan pemerintah yaitu BPNT kepada penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar dari hasil penelitian.

BAB V merupakan penutup yang berisi penutup ialah kesimpulan dari rumusan masalah dan saran guna menguraikan problematika yang terjadi.